

# **SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERAN BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Oleh :

PROF.DR. KI SUPRIYOKO, M.Pd.

**Makalah Disampaikan Pada :**

**SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII  
TEMA  
PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
Diselenggarakan Oleh  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Denpasar, 14 - 18 Juli 2003**

Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd. :

## PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN NASIONAL PERANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN <sup>1</sup>

### A. PENGANTAR

Theodore Brameld dalam karyanya “**Cultural Foundation of Education**” (1957) menyatakan adanya keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan berkenaan dengan satu urusan yang sama, dalam hal ini ialah pengembangan nilai. Sementara itu Edward B. Tylor dalam karyanya “**Primitive Culture**” (1929) menulis apabila kebudayaan mempunyai tiga komponen strategis, yaitu sebagai tata kehidupan (**order**), suatu proses (**process**), serta bervisi tertentu (**goals**), maka pendidikan merupakan proses pembudayaan. Masih menurut Tylor, tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa adanya masyarakat; sebaliknya tidak ada kebudayaan dalam pengertian proses tanpa adanya pendidikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas kita bisa memposisikan pendidikan dengan kebudayaan di dalam tata hubungan yang saling mempengaruhi (**reciprocal relationship**); atau pendidikan merupakan variabel yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan di dalam tata hubungan asimetris di mana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya (**causal asymmetrical relationship**).

Terhadap pembangunan nasional, hubungan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional dapat dijelaskan sbb: paradigma yang pertama pembangunan nasional adalah variabel bebas (**independent variable**) sedangkan pendidikan nasional serta kebudayaan nasional merupakan variabel tergantung (**dependent variable**); sementara itu paradigma kedua, pembangunan nasional merupakan variabel bebas (**independent variable**), kebudayaan nasional adalah variabel antara (**intervening variable**); Sedangkan pendidikan nasional merupakan variabel tergantung (**dependent variable**).

Baik kita mengaplikasikan paradigma pertama maupun paradigma kedua, keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan amat ditentukan oleh sejauh mana kita dapat mengembangkan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional. Kalau kita dapat mengembangkan pendidikan nasional serta kebudayaan nasional secara memadai maka keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan akan dapat dicapai lebih baik lagi.

---

<sup>1</sup> Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI  
Denpasar, 14 - 18 Juli 2003

## B. HASIL PEMBANGUNAN NASIONAL

Tidak dapat dipungkiri pembangunan nasional yang berjalan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai masa orde baru, serta sejak masa orde baru sampai saat ini, telah menghasilkan kemajuan yang amat berarti bangsa Indonesia. Melalui pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat telah dicapai berbagai keberhasilan.

Secara fisik jalan, jembatan, gedung-gedung, dan bangunan fisik lain yang mulanya belum ada menjadi ada, atau yang mulainya belum bagus sekarang menjadi bagus. Fisik jalan misalnya, kalau di awal kemerdekaan kita memiliki jalan beraspal tidak lebih dari 1.000 Km, meningkat menjadi 8.725 Km di awal tahun 1980-an, dan sekarang sudah bertambah lagi menjadi lebih dari 25.000 Km. Keadaan ini juga berlaku untuk jembatan, bangunan pasar, bangunan pertokoan, bangunan perkantoran, dan sebagainya.

Secara nonfisik kemajuan di bidang pendidikan ekonomi dan bidang-bidang pembangunan lainnya juga telah diraih. Dalam hal ini kita bisa menunjuk pada angka-angka partisipasi pendidikan, angka melek huruf, angka melanjutkan studi, dsb, yang meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Tingkat partisipasi pendidikan di Sekolah Dasar (SD) yang bilangannya kurang dari 20 persen pada tahun-tahun awal kemerdekaan sekarang sudah meningkat menjadi di atas 90 persen. Peningkatan yang cukup signifikan seperti ini juga terjadi pada satuan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Perguruan Tinggi (PT).

Bahwa bangsa Indonesia telah banyak mencapai kemajuan di berbagai bidang pembangunan semenjak kemerdekaan sampai sekarang ini tentu tidak terbantahkan; hanya masalahnya adalah bahwa kemajuan itu tidak selaju bangsa-bangsa lain sehingga secara komparatif kita berada pada posisi yang lebih rendah.

Tentang Indeks Pembangunan Manusia atau **Human Development Index** (HDI) misalnya. Dari laporan UNDP sebagai inisiator dan penyelenggara survei HDI di dalam "**Human Development Report 2001**" (2001) ternyata Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 102 dari 162 negara. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, dan Australia ternyata peringkat Indonesia berada dibawahnya. Oleh karena HDI terbangun atas indikator ekonomi pendidikan, kesehatan, dan kependudukan hal itu berarti bahwa tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kependudukan manusia Indonesia berada di bawah Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, dan Australia.

Dalam era yang serba materialistik seperti sekarang ini daya kompetisi ekonomi juga dapat diacu untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Implikasinya negara yang daya kompetisi ekonominya tinggi mengindikasikan keberhasilan pembangunan yang tinggi; sebaliknya, negara yang daya kompetisi ekonominya rendah mengindikasikan keberhasilan pembangunan yang rendah pula.

Selanjutnya dari laporan World Economic Forum (WEF), suatu badan internasional yang berbasis di Geneva, di dalam dokumennya berjudul "**Global Competitiveness Report 2000**" (2000) , menunjukkan demikian rendahnya peringkat Indonesia di dalam hal daya kompetisi ekonomi tersebut. Di dalam hal ini Indonesia hanya berada pada peringkat 44; sementara itu Singapura, Malaysia, Republik Korea, Thailand, dan Filipina masing-masing sudah ada di peringkat 2, 25, 29,31 dan 37.

Dengan indikator yang serupa bahkan International Institute for Management Development (2001) telah memposisikan Indonesia di peringkat 49 dari 49 negara. Dalam hal ini negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dsb, semua berada di atas peringkat Indonesia. Keadaan ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi kita memang lebih rendah dibanding tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dsb,

Dalam skala mikro kebelum-maksimalan atas keberhasilan pembangunan kita di bidang pendidikan dapat dicermati dari kegagalan delegasi Indonesia di forum **International Mathematic Olymppic** (IMO) yang diselenggarakan secara kontinu di setiap tahunnya; demikian juga dengan hasil kompetisi siswa Indonesia pada forum **The Third International Mathematic and Science Study** (TIMSS) yang tidak pernah memuaskan.

Ramon Mohandas di dalam laporan penelitiannya dengan titel "**Report On The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) : Indonesian Student Achievement in Mathematics and Science Compared to Other Countries**" (2000) menuliskan buruknya prestasi matematika dan sains siswa Indonesia di dalam forum dunia tersebut. Dalam bidang Matematika siswa Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 39 dari 42 negara partisipan; sedangkan untuk bidang sains siswa Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 40 dari 42 negara partisipan. Baik di dalam bidang Matematika maupun sains ternyata prestasi siswa Indonesia berada di bawah prestasi siswa dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya.

Sementara itu dalam, hal kemampuan membaca, siswa Indonesia juga tidak berhasil memperlihatkan prestasi terbaiknya. Laporan World Bank dalam "**Education in Indonesia: From Crisis to Recovery**" (1988) telah mengutip hasil penelitian Vincent Greanary yang menyatakan bahwa kemampuan membaca (**reading ability**) anak-anak Indonesia berada pada peringkat paling bawah dibandingkan dengan anak-anak Asia pada umumnya. Dalam hal ini kemampuan membaca anak-anak Indonesia berada di bawah anak-anak Filipina, Thailand, Singapura, serta Hong Kong.

Ilustrasi substantif-komparatif tersebut menunjukkan di satu sisi pembangunan nasional kita telah menghasilkan berbagai kemajuan bangsa di berbagai bidang sekaligus; di sisi lain menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa kita ternyata belum atau tidak selaju kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa tetangga.

### C. PERAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN

Sekarang bangsa Indonesia sudah berada dalam era globalisasi, satu era yang ditandai dengan "menciutnya" dunia disebabkan berkembangnya teknologi informasi. Dalam era ini dunia yang sebenarnya luas terkesan menjadi sempit karena daya jangkau informasi yang semakin panjang, semakin luas, dan semakin cepat sehingga membuka kemungkinan sistem aksesibilitas yang makin sempurna.

Dalam laporan UNDP "**Human Development Report 1999**" (1999) disebutkan secara jelas ciri-ciri globalisasi sbb: (1) **Ethic**, adapun maksudnya ialah tuntutan untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM; (2) **Inclusion**, maksudnya ialah adanya tuntutan untuk memperkecil perbedaan-perbedaan antarbangsa; (3) **Human Security**, yaitu adanya tuntutan sanggup mengeliminasi instabilitas sosial; (4) **Sustainability**, yaitu adanya tuntutan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan; serta (5) **Development**, adanya kesanggupan untuk berusaha mengakhiri kemiskinan dan deprivasi.

Jiwa dari globalisasi itu sendiri, adalah informasi yang tidak berbatas (**borderless information**). Di dalam situasi yang seperti ini terjadilah proses lintas budaya (**trans cultural**) serta silang budaya (**cross cultural**) yang kemudian mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan yang lainnya. Pertemuan nilai-nilai budaya, atau disebut kontak budaya (**cultural contact**), dapat menghasilkan dua kemungkinan; pertama, pertemuan tanpa menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna disebut dengan asimilasi (**assimilation**), serta kedua, pertemuan yang membuahkan nilai-nilai baru yang bermakna disebut akulturasi (**acculturalization**).

Di dalam konteks kebudayaan nasional, globalisasi itu bukan sesuatu yang menakutkan namun justru membuka peluang untuk menciptakan kemajuan kebudayaan yang positif; meski globalisasi itu sendiri tidak bebas dari unsur-unsur negatif. Untuk mengantisipasi itu bangsa Indonesia memiliki pedoman yang disebut "Teori Trikon", yang terdiri dari tiga komponen sbb: Kontinuitas, melanjutkan budaya para "leluhur" bangsa yang mengandung nilai-nilai positif; Konvergensi, membuka peluang bagi budaya manca untuk berakulturasi dengan budaya Indonesia; dan Konsentrisitas, hasil pertemuan budaya manca dengan budaya Indonesia hendaknya dapat menghasilkan budaya (nilai-nilai) baru yang bermakna.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa saat ini kebudayaan nasional tidak kondusif untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan budaya agar pembangunan nasional yang dijalankan bangsa Indonesia dapat membuahkan hasil yang optimal.

Sebagaimana yang dicantumkan di dalam "Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Indonesia" (2000) pada dasarnya perubahan budaya bangsa Indonesia itu meliputi dua aspek sekaligus; masing-masing menyangkut perubahan sistem pengetahuan dan perubahan budaya politik. Di satu sisi sistem pengetahuan harus lebih ditingkatkan kualitasnya dan di sisi lain perubahan budaya politik masyarakat harus lebih direalisasikan.

Selanjutnya perubahan sistem pengetahuan meyangkut lima aspek sekaligus, yaitu sbb: (1) dari egosentrisme ke sivilitas, (2) dari pengabaian hukum ke kesadaran hukum, (3) dari fanatisme ke toleransi, (4) dari cukup diri ke saling bergantung, serta (5) dari sejarah alamiah ke sejarah yang manusiawi. Di sisi lain perubahan budaya politik juga menyangkut lima aspek sekaligus, yaitu sbb : (1) dari kawula ke warga negara, (2) dari parokial ke kenegaraan, (3) dari negara serba kuasa ke negara serba sahaja, (4) dari Pancasila sebagai ideologi ke ilmu , dan (5) dari Pancasila yang terpisah ke yang satu.

Untuk menjalankan perubahan budaya tersebut diperlukan adanya dukungan pendidikan. Oleh karena dalam realitasnya kinerja pendidikan nasional kita masih rendah maka persoalannya sekarang ialah bagaimana membenahi pendidikan itu sendiri untuk meningkatkan kualitas manusia supaya bisa berperan dalam mengubah budaya bangsa agar kondusif terhadap pembangunan nasional.

Belum memuaskannya kinerja pendidikan di negara kita tidak lepas dari visi kepemimpinan kolektif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sangat Ironis, negara Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam ternyata kurang memiliki pemimpin yang mempunyai visi kepemimpinan jauh ke depan serta komitmen yang tinggi untuk membangun bangsa melalui pendidikan.

Keadaan tersebut di atas bukan saja dialami sekarang, akan tetapi sudah dirasakan sejak bertahun-tahun yang lalu ketika kondisi ekonomi dan politik tidak sekompleks saat ini.

Para petinggi pemerintah cenderung disibukkan oleh berbagai permasalahan instan serta terlena pada berbagai persoalan yang berjangka pendek sehingga kurang dapat memecahkan permasalahan bangsa dalam jangka panjang ke depan. Sampai sekarang kita tidak dapat menggambarkan bagaimana profil bangsa Indonesia seperempat abad ke depan dikarenakan para petinggi pemerintah memang tidak memiliki desain perencanaan yang matang.

Di samping kurang memiliki visi kepemimpinan jauh ke depan ternyata komitmen pemerintah terhadap pendidikan juga sangat terbatas adanya. Pada waktu pemerintahan negara masih menggunakan sistem sentralisasi terlihat bahwa komitmen pemerintah (pusat) terhadap bidang pendidikan jauh dari kata maksimal. Sekarang, ketika pemerintahan negara menggunakan sistem desentralisasi ternyata komitmen pemerintah pusat terhadap bidang pendidikan masih saja jauh dari kata memadai; bahkan keadaan seperti ini juga dilakukan oleh banyak pemerintah daerah.

Rendahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan dapat dicermati antara lain pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada bidang pendidikan. Sejak kemerdekaan dideklarasikan di negara ini lebih dari setengah abad yang lalu ternyata anggaran pendidikan tidak pernah mencapai angka yang memadai .

Anggaran pendidikan di Indonesia memang sangat minim dan termasuk paling rendah dibanding negara-negara lain, baik dengan negara-negara maju, berkembang, maupun

terbelakang. Anggaran pendidikan di Indonesia hanya sekitar 1 persen dari GNP; pada hal angka rata-rata untuk negara-negara terbelakang (**least developed countries**) seperti halnya Angola, Bangladesh, Malawi, Ethiopia, Congo, Nepal, Samoa, dsb, sudah mencapai bilangan 3,5 persen. Sungguh-sungguh terjadi, Indonesia yang konon sudah lebih maju dari negara-negara terbelakang tersebut ternyata lebih pelit dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan pendidikan rakyat. Hal ini sungguh tidak realistik.

Kalau dibandingkan perjalanan pendidikan Indonesia dengan Malaysia cukup menarik hasilnya. Perjalanan kita lebih lambat dari pada Malaysia. Dulu Malaysia pernah berguru pada Indonesia, kini kondisinya terbalik 180 derajat. Pendidikan di Malaysia maju dengan pesat; dengan program SMART-nya pendidikan dasar maju pesat dan dengan program Malaysia 2020-nya maka pendidikan tinggi maju pesat. Ketika Indonesia kehilangan ketangguhan daya saing, sekarang daya saing Malaysia diperhitungkan oleh masyarakat dunia.

Apa kunci kemajuan di Malaysia? Pertama, para petinggi pemerintah di Malaysia memang memiliki visi kepemimpinan yang jauh ke depan. Dibuatnya program "Malaysia 2020" dan jabarannya dalam program SMART di bidang pendidikan membuktikan hal itu. Kedua, komitmen pemerintah terhadap pendidikan memang relatif tinggi. Ini semua dibuktikan secara riil dengan mengalokasi anggaran pendidikan secara memadai. Selama ini, anggaran pendidikan di Malaysia tidak pernah kurang dari 15 persen terhadap budget negara.

Ilustrasi tersebut di atas menggambarkan pentingnya visi dan komitmen pemerintah untuk, meningkatkan kinerja pendidikan nasional sehingga lebih berperan dalam mengkondisi masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional.

## **E. PENUTUP**

Pembangunan nasional yang berkelanjutan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, memerlukan dukungan kebudayaan nasional yang kondusif untuk itu. Untuk kepentingan tersebut diperlukan manusia-manusia bermutu sebagai hasil dari pendidikan; dan untuk itu semua diperlukan visi dan komitmen pemerintah yang lebih nyata terhadap pendidikan itu sendiri !!!